ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa tentang "Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terhadap Tenaga Kerja yang Terdampak Covid-19 berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016". Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang merupakan lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Salah satunya mengenai penanganan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam melakukan penanganan terhadap tenaga kerja yang terdampak Covid-19, serta hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam melakukan penanganan terhadap tenaga kerja yang terdampak Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang juga penulis lakukan sebagai data pendukung.

Hasil penelitian ini meliputi *pertama* penanganan terhadap tenaga kerja yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menangani tenaga kerja yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melakukan kegiatan penanganan seperti *monitoring* perusahaan yang ada di Kota Semarang, pemberian bantuan upah dari pemerintah bagi tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. *Kedua* pelaksanaan kegiatan penanganan terhadap tenaga kerja yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang mendapati adanya kendala internal yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan adanya perubahan anggaran. Adapun kendala eksternal yakni adanya kebijakan pembatasan sosial dan kurangnya kesadaran pelaku usaha atau perusahaan terkait pendataan.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja, Tenaga Kerja, Covid-19.